



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DIKOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

ANGEL SRIWANDA SIREGAR

2063201112

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DIKOTA PEKANBARU**

Diajukan
Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

ANGEL SRIWANDA SIREGAR

2063201112

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah Hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Angel Sriwanda Siregar

NIM : 2063201112

Tanda Tangan :

Tanggal : 01 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jln. Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. 0761 52658

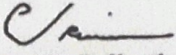
STATUS : AKREDITASI B

LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

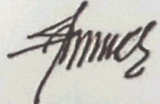
Nama : Angel Sriwanda Siregar
NIM. : 2063201117
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kebijakan Program Kampung Iklim (Proklam) Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru

Mengetahui :

Pembimbing I


Dr. Hj. Prihati, M.Si
NIDN. 1006105804

Pembimbing II


Afni Z., S.IP., M.Si
NIDN. 1012058804

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai Pekanbaru Hp. 0851 7434 2024
ode Pos 28265 Web Site: <https://fia.unilak.ac.id> email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Angel Sriwanda Siregar

NIM : 2063201112

Jurusan : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan DiKota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) pada Program
Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Prihati, M.Si

()

Pembimbing : Afni Z., S.IP., M.Si

()

Penguji : Dr Khuriyatul Husna.. S.Sos., MPA

()

Penguji : Dr. Sulaiman Zuhdi, S.Sos. M.Si

()

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 5 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianyalah sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari proposal ini disusun untuk menjadi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan melalui pesan ataupun bimbingan sampai saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini, ucapan terimakasih ini penulis tunjukkan kepada:

1. Ibu Dr. Khuryatul Husna, S.Sos., MPA yang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini S.Sos.,M.Si yang menjadi Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr.Li.Dra Dian Rianita MA yang mnjadi Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nst, S.Sos., M.Si yang menjadi Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Dr.Prihati, M.Si yang menjadi Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian serta arahan yang baik untuk saya selama proses bimbingan berlangsung.
6. Ibu Afni Z, S.IP., M.Si yang menjadi Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing saya.
7. Ibu Kamaratih Laksminandi S.Si sebagai Subkordinator Pembentukan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(DLHK) Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian

8. Bapak Awaldi Hasibuan sebagai Ketua RW 05 Rumbai Barat di Kelurahan Agrowisata.
9. Bapak Rajiman sebagai Ketua RW 12 Kecamatan Rumbai yang dapat membantu saya dalam memenuhi data.
10. Bapak Kasmijo S.AP sebagai Kasi Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan di Kelurahan Palas yang dapat memenuhi data yang ada.
11. Terkhususnya kepada kedua Orang Tua Saya yang memberikan dukungan terbaik kepada Saya baik berbentuk moral dan juga doa sehingga saya mampu menyelesaikan proses ini.

Terakhir yang menjadi harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

Angel Sriwanda Siregar

ABSTRAK

Nama : Angel Sriwanda Siregar
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pelaksanaan Kebijakan Program Kampung Iklim (Poklim)
Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penelitian ini berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dimana peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan DLHK dalam pelaksanaan keberlanjutan kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Penelitian ini dilakukan karena penulis telah melihat fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan desa maupun kelurahan, yang diakibatkan dari ketidak merataan jangkauan sosialisasi DLHK dalam memberikan edukasi bahwa program yang dibuat Kementrian Lingkungan Hidup baik digunakan disaat perubahan iklim terjadi sehingga masyarakat mempunyai ketahanan iklim. dan juga ingin mengetahui hal apa yang menjadikan penghambat DLHK dalam menangani fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan DLHK dalam menangani fenomena tersebut. Teori yang digunakan adalah teori Mazmanian dan Sebatier, 2014:68 menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti akan melakukan pendekatan secara fenomenologis dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaan DLHK dalam menangani keberlanjutan kebijakan

ProKlim selain melakukan sosialisasi dan juga terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar yang mereka tempati tetapi tidak menjadi hal yang dipermasalahkan didalam pelaksanaan, program Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan tetapi tidak keseluruhan desa atau kelurahan dan tidak melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat di Kota Pekanbaru, dan juga masyarakat itu sendiri kurang memperdulikan lingkungan yang mereka tempati dikarenakan ada masyarakat yang bekerja yang tidak mempunyai waktu untuk ikut serta yang dimana jika mereka ikut dalam menjaga lingkungan mereka akan berdampak baik bagi mereka terutama bagi ketahanan pangan mereka.

Kata Kunci : Upaya DLHK, ProKlim, dan Kelembagaan

ABSTRACT

Name : Angel Sriwanda Siregar
Study Program : Administration Public
Title : Implementation of The Climate Village Program (Proklim) Policy by the Environment and Hygiene Service

This research is directly related to the Departement of environment and Hygiene service where researchers want to know the efforts made by DLHK in implementing the sustainability of the climate village Program (ProKlim) policy. This research was conducted because researchers have seen phenomena that actually occur in villages and sub-districts, resulting from the uneven reach of DLHK outreach in providing education that program created by the ministry of the environment are good for use when climate change occurs so that communities have climate resilience and also wan to know what things hinder DLHK in dealing with the phenomena that occur. This research aims to find out what DLHK should do to deal with this phenomenon. The theory used is Mazmanian dan Sebatier, (2014:68) explain that implementation of basic policy decisions usually in the form of laws, but can also take the form of orders or decisions of important executive bodies or judicial decisions. The research uses qualitative methods in which the researcher will take a phenomenological approach and collect data using direct interview, observation and documentation techniques. The result desired by researchers in this shortcomings in handle the sustainability of the Proklim policy apart from conducting socialization and also a lack of pblick awareness of the environment they live in but this is not a

problem in implementing the program. The government has carried out socialization regarding the importance of protecting the environment but this is not the case. Throughout the village or sub district and does not provide direct guidance to the community in Pekanbaru City and also the people themselves don't care about the environment they live in because there are working people who don't have time to get involved, so if they take part in protecting their environment it will have a good impact on them, especially on their food security.

Keyword : DLHK Effort, ProKlim, and Institutional

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Konsep Teoritis	13
2.1.1 Administrasi Publik.....	13
2.1.2 Kebijakan	14
2.1.3 Pelaksanaan.....	15
2.1.4 Bentuk Upaya DLHK.....	18

2.1.5 Perubahan Iklim	18
2.1.6 Program Kampung Iklim.....	19
2.1.7 Ruang Lingkup Program Kampung Iklim	21
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Fokus Penelitian	27
2.4 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Bentuk Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Jenis Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	34
4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	34
4.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DiKota Pekanbaru.....	38
4.3 Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	41
4.3.1 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	41
4.3.2 Struktur Organisasi	42
4.4 Peraturan Kebijakan Proklamasi	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	50

5.1 Pelaksanaan Kebijakan Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kota Pekanbaru	50
5.1.1 Mudah Atau Tidaknya Pelaksanaan Dapat Dilaksanakan.....	51
5.1.2 Kemampuan dalam menstrukturkan proses	57
5.1.3 Variabel Pendukung	62
5.2 Faktor penghambat DLHK dalam melakukan pelaksanaan kebijakan program kampung iklim.....	68
5.2.1 Faktor pengambat DLHK.....	68
5.2.2 Faktor penghambat dari masyarakatnya.....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
DOKUMENTASI	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Proklamasi Kota Pekanbaru	6
Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan, Ibukota dan Luas Daerah Tahun 2022	34
Tabel 4.2 Jumlah kelurahan pada kecamatan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proklamasi	3
Gambar 4.4 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu Negara dengan iklim tropis dan rentan terhadap perubahan iklim yang sangat parah yang berujung ke pemanasan global, perubahan iklim berfokus pada pola suhu dan cuaca jangka panjang perubahan iklim juga dapat digolongkan sebagai perubahan suhu yang tiba-tiba, pola curah hujan dan cuaca, angin dan lain sebagainya. Menurut Mtsweni et al, 2020 (Susanti dkk., 2022:1) perubahan iklim merupakan kondisi berubahnya suhu temperatur dan distribusi curah hujan yang membawa dampak secara luas terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. faktor penyebab perubahan iklim antara lain, dampak gas rumah kaca, Pemanasan global, menipisnya lapisan Ozon, dan rusaknya fungsi hutan. Perubahan iklim dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif seperti banjir, kekeringan berkepanjangan, tanah longsor, dan kebakaran hutan.

Berubahnya iklim akan terus mempengaruhi pada suatu ekosistem dan akan berdampak kepada seluruh manusia. Dengan adanya perubahan iklim maka akan menimbulkan suatu resiko besar bagi kesehatan manusia, terutama akan berdampak pada pangan serta akan berdampak terhadap pembangunan ekonomis (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://proper.menlh.go.id>, 2017:1)

Perubahan iklim dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor seperti suhu udara, radiasi matahari, kecepatan angin, dan curah hujan. Suhu permukaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pengaruh radiasi matahari yang diterima, pengaruh dari darat dan juga laut, panas yang signifikan, tutupan lahan ditinjau dari jenis tanah, dan pengaruh sudut datangnya sinar matahari.

Perubahan iklim yang terus berlanjut hingga saat ini merupakan isu global termasuk Negara Indonesia dan menjadi isu nasional dan juga memperdebatkan cara mengatasinya. Perubahan iklim merupakan hal yang nyata dan menjadi ancaman yang sangat besar dikalangan masyarakat terutama di Kota Pekanbaru. Berdasarkan artikel terbaru Pascaline Gaborit (Direktur, Pilot4DEV) ”ketahanan dan manajemen bencana iklim di kota Pekanbaru strategi ketahanan wilayah respons penanggulangan bencana iklim di perkotaan, serta dampaknya dalam hal adaptasi dan perubahan transformative, Pascaline berpendapat semakin maraknya penggunaan konsep ketahanan telah menyamakan antara ambisi dan solusi adaptasi iklim yang lebih baik, lebih adil, dan lebih dapat dipercaya”

Perubahan iklim dipengaruhi dari efek gas rumah kaca di atmosfer. Manusia menjadi salah satu yang memberikan dampak negatif yang lebih dominan melalui aktivitas sehari-harinya melalui proses penguraian sampah dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga menipiskan lapisan ozon di atmosfer.

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini telah menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan di tingkat nasional, internasional, dan lokal. Fenomena tersebut perlu diberikan perhatian lebih dengan mengintensifkan langkah-

langkah nyata yang dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk melaksanakan upayanya di tingkat global, Indonesia telah meluncurkan program yang berfokus pada iklim dan lingkungan hidup di tingkat nasional, yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini telah dilaksanakan di pekanbaru pada tahun 2015 di 3 lokasi yaitu kecamatan Payung Sekaki, Tampan, dan Bukit Raya. Adapun fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dlhk dalam melaksanakan program kampung iklim ini kepada masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kampung iklim ini.



Gambar 1.1 Proklm

Sumber data : Ditjen ppi KLHK Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 membahas tentang Program Kampung Iklim (ProKlim) yaitu program yang dirancang untuk mendorong masyarakat lokal dan seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak secara lokal. Diperlukan langkah-langkah untuk membuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dapat dicegah melalui langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang didukung oleh organisasi lokal yang peduli langsung dengan kesehatan dan lingkungan Proklm sangat penting karena dapat menguatkan dan memberikan kesadaran serta mempengaruhi. Dalam rangka untuk mencegah efek gas rumah kaca di atmosfer, Indonesia melakukan upaya dengan ikut serta dalam komitmen internasional yang telah ditanda tangani oleh United Nations Framework Convection on Climate Change dalam Undang-undang RI No 6 Tahun 1994, tentang pengesahan konveksi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu yang ikut dalam kerja sama tersebut dikarenakan Indonesia memegang peran yang memiliki hutan tropis dan Negara kepulauan yang mempunyai lautan yang dapat berfungsi sebagai penyerap gas emisi.

Sejalan dengan semakin pentingnya hal-hal untuk pencegahan dan pengurangan dampak buruk perubahan iklim, berbagai upaya kolaboratif telah dilakukan. Semua pihak harus mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas kerusakan alam, permasalahan akibat perubahan iklim bukanlah permasalahan individu, namun permasalahan masyarakat disuatu wilayah atau negara. Yang ingin

dicapai dengan mengurangi sampah yang merupakan salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas sehari-hari manusia.

Proklamasi harus memiliki langkah-langkah yang penting didalam pengendalian perubahan iklim. Proklamasi sendiri dibuat langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KLHK secara langsung mengundang para aparat pemerintah terutama di daerah sebagai pelaksananya dan masyarakat juga turut ikut andil sebagai pengguna yang aktif. Proklamasi merealisasikan pernyataan pemberdayaan masyarakat atau Community Based Development. Didalam pemberdayaan masyarakat, ada berbagai hal yang dijadikan aspek yang harus diperhatikan yaitu, lembaga penunjang disaat proses penerapan, kesetaraan(equity), keamanan(security), keberlanjutan(sustainability), dan kerjasama(cooperation) yang dapat memanfaatkan sumber daya local.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengungkapkan bahwa Proklamasi telah tertulis dalam Peraturan Menteri LHK No P.84/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Peraturan Dirjen PPI No P.4:PPI/SET/KUM.1/2/2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. DLHK mempunyai dampak yang besar dalam program ini. Dilihat secara umumnya program nasional ini belum banyak diketahui oleh kalangan masyarakat.

Dapat dilihat dari lokasi yang telah mengikuti program ini di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai 2023 (DLHK) terdapat 3 lokasi sebagai Proklamasi utama, 5 lokasi sebagai Proklamasi madya dan 4 lokasi sebagai Proklamasi pratama. Target kampung iklim secara nasional sebanyak 20.000 kampung iklim sampai tahun 2024

baik kabupaten atau kota didalamnya, kabupaten atau kota yang ada diindonesia ada sekitar 514 kab/kota, maka setiap kab/kota harus memiliki 38 kampung iklim. Saat ini Kota Pekanbaru ada 27 Kampung iklim yang terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN) dan kurang 11 lagi kampung iklim sampai tahun 2024. Kampung iklim memiliki tingkatan mulai dari madya, pratama, dan umum. Berikut ini akan menampilkan data proklamasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1.1 Data Proklamasi 2019-2023 Kota Pekanbaru

No	Lokasi Proklamasi	Kecamatan	No. Registrasi Proklamasi	Tahun Proklamasi	Kategori Proklamasi
1.	Proklamasi RW 05 Kel.Agrowisata Rumbai Barat Kota Pekanbaru	Rumbai Barat	11-PK-V-2023-14551	2023	
2	Proklamasi Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau GCF	Lima Puluh	11-PK-III-13566	2023	
3.	Proklamasi RW 16 Kel. Tobek Godang Kec.Binawidya Kota Pekanbaru	Binawidya	11-PKV-2022-10214	2022	Madya
4.	Proklamasi RW 07 Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru	Binawidya	11-PK-V-2022-10209	2022	Madya
5.	Proklamasi RW 13 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Tenayan Raya	11-PK-V-2022-8879	2022	Madya
6.	Proklamasi RW 06 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Kelurahan Sidomulyo	11-PK-V-2022-8313	2022	Pratama
7.	Proklamasi Pondok	Marpoyan	11-PK-2022-	2022	Madya

No	Lokasi Proklamasi	Kecamatan	No. Registrasi Proklamasi	Tahun Proklamasi	Kategori Proklamasi
	Pesantren Ibnu AL Mubarak RW 003 Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Barat	Damai	9998		
8.	Proklamasi RW 04 Kel. Binawidya Kec. Binawidya	Binawidya	11-PK-V-2022-9993	2022	
9.	Proklamasi RW 12 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Rumbai	11-PK-V-2022-9990	2022	Pratama
10.	Proklamasi RW 13 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Rumbai	11-PK-V-2022-9989	2022	Pratama
11.	Proklamasi RW 03 Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya	Binawidya	11-PK-V-2021-7745	2021	Utama
12.	Proklamasi RW 02 Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya	Binawidya	11-PK-V-2021-6731	2021	Utama
13.	Proklamasi Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru	Tampan	11-PK-III-2020-5894	2020	Utama
14.	Proklamasi Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru	Rumbai Barat	11-PK-III-2019-4276	2019	
15.	Proklamasi RW 04 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru	Bukit Raya	11-PK-III-2019-4173	2019	Pratama
16.	Proklamasi RW 05 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Payung Sekaki	11-PK-III-2019-4050	2019	Madya

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, desa dan kelurahan peserta dalam Program Kampung dengan kategori Utama, Madya, Pratama dibuat otomatis oleh sistem SRN tersebut dengan maksimum 2 tahun pembinaan adaptasi dan mitigasi di setiap desa dan kelurahan, yang dimana utama memiliki nilai 81%, madya memiliki nilai 51-80%, dan pratama memiliki nilai 0-50% persenan kategori menggunakan spectrum dari sistem. Iklim ini lebih mencakup wilayah pusat kota yang lebih luas dibandingkan desa dan kelurahan di daerah terpencil dan yang lebih berpeluang terkena dampak dari perubahan iklim. Dilihat dari jumlah kecamatannya sekitar 15 kecamatan yang didalamnya terdapat desa dan kelurahan Kota Pekanbaru mempunyai sebanyak 83 kelurahan dan hanya 11 kelurahan saja yang mengikuti Program tersebut sehingga Kota Pekanbaru masih harus mencapai target yang diberikan oleh Gubernur Riau untuk menjadikan Riau Hijau dan Kota Pekanbaru adalah salah satunya yang ikut andil dalam visi tersebut.

Peraturan Program Kampung Iklim bertujuan untuk membangun partisipan dengan ketahanan iklim dan siap menjalani kehidupan yang rendah akan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kota Pekanbaru memiliki SOP pelaksanaan dalam menerapkan desa dan kelurahan yang ikut andil dalam Program Kampung Iklim. Dalam hal ini masyarakat harus berpartisipasi dalam kebijakan program kampung iklim agar tujuannya tercapai. Kota Pekanbaru telah turut ikut melaksanakan program kampung iklim tersebut dengan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan kewaspadaan termasuk di tempat yang terkena dampak besar saat terjadi perubahan

iklim, supaya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi terutama yang berbahaya bagi penduduk.

Berdasarkan tabel diatas penerapan SOP yang telah teridentifikasi menggambarkan lokasi setiap desa atau kelurahan yang ingin berpartisipasi dalam program kampung iklim dan wajib mengikuti sesuai dengan ketentuan administrasinya, jika dilihat dari ketentuannya tanpa adanya sosialisasi lebih lanjut ke desa dan kelurahan terpencil dan desa dan kelurahan tersebut yang mungkin terkena dampak besar dari perubahan iklim tidak akan mengikuti program tersebut dikarenakan masih minimnya informasi yang mereka dapat mengenai program kampung iklim tersebut.

Dilihat dari status SOP yang ada, target ketahanan terhadap perubahan iklim masih belum tercapai dan desa serta kelurahan yang berpartisipasi dalam kebijakan tersebut masih sebagian kelurahan yang ada Kota Pekanbaru. Desa atau kelurahan yang ikut berpartisipasi didalamnya mempunyai masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dalam program ini dikarenakan mereka paham hal apa yang akan terjadi jika tidak ikut dalam program tersebut terutama akan dampak yang terjadi dari perubahan iklim tersebut. Faktor terpenting dalam implementasi kebijakan ini adalah partisipasi masyarakatnya untuk mensukseskan kebijakan ini.

Pelaksanaan DLHK dalam keberlanjutan kebijakan program kampung iklim memiliki permasalahan dikarenakan dari fenomena perubahan iklim didalamnya, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian permasalahan yang ditemukan seperti

1. Kurangnya pengaplikasian langsung oleh dlhk mengenai program kampung iklim tersebut dlhk hanya melakukan sosialisasi sehingga program tersebut belum semua kelurahan yang mengikutinya dilihat dari kelurahan yang ada dipekanbaru Sehingga hal ini dapat dikatakan sebuah masalah yang perlu diatasi dan dicari solusinya
2. Kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang program tersebut dikarenakan adanya kelurahan yang pihaknya belum menyampaikan mengenai kebijakan proklam sehingga membuat sebagian masyarakat kelurahan di Kota Pekanbaru masih belum mengetahui program tersebut, dan masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat bagi kelurahan yang telah sudah melaksanakan program tersebut dengan alasan masyarakat memiliki hal yang lebih penting dilakukan seperti pekerjaan tetapi alasan seperti ini tidak menjadi acuan bagi pelaksanaan program ini masyarakat hanya perlu diberikan pemahaman yang matang tentang program tersebut supaya terciptanya partisipasi yang besar dari masyarakatnya tersebut dan dapat juga memaksimalkan pelaksanaan program kampung iklim.

Dalam menghadapi berbagai tantangan pada perubahan iklim yang terjadi pelaksanaan DLHK yang menjadi titik keberhasilan Program Kampung Iklim ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu penelitian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Program Kampung Iklim atau Proklam oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru menjadi sangat relevan untuk pengoptimalan kinerja DLHK dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini

akan menjelaskan bahwasannya peran DLHK sangat penting dalam Pelaksanaan kebijakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari penjelasan yang ada di latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa peneliti ingin mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Kampung Iklim (ProKlim) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru
2. Apa Saja Yang Menjadikan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang ingin dicapai untuk melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Kampung Iklim oleh DLHK di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Apa Yang Menjadikan Faktor Penghambat DLHK Dalam Melakukan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai bentuk pertimbangan khusus peneliti melalui penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis, dari penelitian ini dapat digunakan sebagai hal untuk memberikan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menetapkan Program Kampung Iklim.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Simpulan yang didapatkan selama wawancara berlangsung secara langsung maka didapatkan hasil dari penelitian tersebut bahwasannya,

Pelaksanaan yang dilakukan oleh DLHK dalam menjalankan program dengan cara sosialisasi dikategorikan masih belum optimal dilihat atau kurangnya pendampingan langsung dilihat dari banyaknya kelurahan atau desa yang ikut berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim target yang telah ditetapkan sampai tahun 2024 sebanyak 38 kampung iklim masih belum terpenuhi saat ini kampung iklim yang ada di Kota Pekanbaru ada 27 Kampung Iklim dan kurang 11 Kampung Iklim

Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang diperlukan dalam melaksanakan Program Kampung Iklim dikarenakan program ini untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dimana emisi gas rumah kaca ini ditimbulkan dari sebagian aktivitas masyarakatnya, tetapi dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar masih kurang.

Program kampung iklim ini adalah program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dimana dalam hal ini diperlukan bantuan berupa dana untuk

dapat melaksanakan program ini ke setiap Kelurahan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang dimana hal ini sangat diperlukan bantuan dana atau bibit untuk memulai pelaksanaan program tetapi dilihat dari wilayah yang telah melakukan dana yang diberikan tidak seterusnya berjalan hanya saat diawal pelaksanaan dana atau bantuan bibit diberikan selebihnya dari swadaya masyarakat diwilayah tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan masih tergolong belum optimal dikarenakan kurangnya pembinaan langsung atau pengawasan langsung sehingga sosialisasi yang telah diberikan oleh DLHK kepada perwakilan Kelurahan belum dikatakan dapat menyampaikan hasil sosialisasi mengenai program kampung iklim dan manfaat dalam berpartisipasi didalamnya.

6.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang ada di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. DLHK harus melakukan suatu perencanaan untuk memaksimalkan kebijakan program tersebut bukan hanya sosialisasi saja melainkan adanya pembinaan langsung kepada setiap kelurahan atau juga bisa langsung ke masyarakatnya
2. DLHK harus menjalankan tugasnya dengan maksimal dengan cara membentuk tim khusus atau badan pengawasan guna untuk turun langsung ke masyarakat dan membantu masyarakat dalam pelaksanaan program dikarenakan masih banyaknya masyarakatnya yang belum mengetahui kebijakan program tersebut.

3. DLHK harus dapat memaksimalkan dan memastikan bahwasannya sosialisasi yang diberikan kepada lurah atau kepala desa apakah disampaikan langsung kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Z, Fara Merian Sari, P. (2021). Penguatan Kelembagaan Kampung Iklim Tobekgodang Kota Pekanbaru Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1597–1605.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Alfabeta (ed.); Edisi Revi).
- Baskoro, wahyu. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Setia Kawan.
- Emilia, r resti. (2021). *Upaya Orang Tua Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak Usia 5 – 6 Tahun Di Tk Al – Firdaus Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negri.
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41>
- <http://proper.menlh.go.id>. (2017). Peringkat Proper 2016 - 2017. *Peringkat PROPER 2017*.
- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang. *Jurnal Komunitas*, 12(1), 1–10.
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v12i1.3355>

- Karima, F. (2022). Implementasi Strategi Komunikasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Magelang. *Jurnal Kirana*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.19184/jkrm.v3i2.33802>
- Kencana, I. S. (2016). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT.Bumi Aksara.
- Mazmanian dan Sebatier. (2014). *Analisis Kebijakan Publik* (3 maret 20). Scott, Foresman.
- Muhadjir, N. (n.d.). *Metode Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan* (Surya Widy). Rake, Sarasin. http://suryawidyapustaka.smkmuh1lendah.sch.id//index.php?p=show_detail&id=1667
- Susanti, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., Pradana, F. G., Handayani, S., & Sutaryono, S. (2022). Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (Proklam) di Desa Kertonatan. *Buletin KKN Pendidikan*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v4i1.19183>
- Www.kemkes.go.id. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim Di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Satuan Tekad Menuju Indonesia Sehat, V*, 42–49.